



DANA HIBAH PANWAS CAIR 50 Persen Terserap untuk Honorarium

YOGYA (KR) - Kendati sudah dilantik sejak 24 Mei 2016 lalu, namun jajaran Panwas Kota Yogya baru bisa memperoleh kucuran dana, Jumat (10/6). Separuh atau 50 persen dana yang diterimanya itu pun akan terserap untuk honorarium pengawas di tingkat kecamatan hingga TPS.

Total dana hibah dari APBD Kota Yogya untuk Panwas ialah Rp 4,2 miliar. Jauh lebih kecil dari dana hibah KPU yang mencapai Rp 14,9 miliar. Hal ini lantaran kinerja KPU selaku penyelenggara lebih kompleks meliputi logistik hingga sosialisasi, sedangkan Panwas hanya fokus pada pengawasan.

"Kami anggap, anggaran itu sudah mencukupi kebutuhan," tandas Ketua Panwas Kota Yogya, Agus Muhammad Yasin usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NP-HD) bersama walikota di Balaikota Yogya, kemarin.



Walikota Yogya menyerahkan berkas dana hibah ke Panwas.

Diakuinya, sebagian besar dana tersebut akan terserap untuk honorarium petugas pengawas. Mulai dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) serta Pengawas TPS.

Panwascam berjumlah tiga orang di tiap kecamatan, PPL satu orang di tiap kelurahan dan Pe-

ngawas TPS masing-masing satu orang di tiap TPS.

Agus menambahkan, honorarium menyedot anggaran besar lantaran masa kerja Panwascam juga lebih lama. Akhir bulan ini proses perekrutan Panwascam sudah akan dilakukan, kemudian sebulan ke depan targetnya sudah dilantik dan langsung bekerja.

Sedangkan PPL baru akan direkrut pada September atau empat bulan sebelum pemungutan suara.

"Kemudian mulai tahun ini juga ada Pengawas TPS. Jika TPS Pilwali diasumsikan ada 810 unit, maka butuh 810 petugas pengawas. Jumlah yang cukup banyak," tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya, Kadri Renggono mengaku, dana hibah untuk Panwas tersebut dicairkan sekaligus atau tidak secara bertahap. Pihaknya pun tetap membuka diri jika dalam perjalanan kebutuhannya bertambah sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran.

"Kalau dananya ternyata kurang, bisa mengajukan penambahan. Tapi harus ada permohonan dari Panwas, dan akan kami bahas melalui APBD Perubahan tahun ini," akunya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005